



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEHATAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018**

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

Jl. KH. Samanhudi No. 12 Telp/ Fax. (0284) 321012 Pemalang 52311

Website <http://dinkes.pemalangkab.go.id>



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEHATAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018**

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

Jl. KH. Samanhudi No. 12 Telp/ Fax. (0284) 321012 Pemalang 52311

Website <http://dinkes.pemalangkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan, walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan.

Penyusunan laporan kinerja ini guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang secara substantif mewajibkan semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun-tahun mendatang . Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dan pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

Pemalang, Januari 2019



dr. ERNA MURAIMI, M.Hlth.Sc
Pemuda Utama Muda
NIP. 19630329 198903 2 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2018 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang diterapkan sebagai bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kesehatan ini didalamnya memuat informasi tentang pencapaian kinerja selama tahun 2018 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang dimuat di dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. LKjIP ini disusun dengan pengumpulan data pendukung, dilanjutkan dengan analisis untuk mengetahui pencapaian target indikator kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018. Tercatat sebanyak 4 (empat) indikator kinerja dari 5 (lima) indikator kinerja yang semua capaian kerjanya masuk dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu ; Usia Harapan Hidup masih belum dapat dievaluasi sebab menunggu data keluaran BPS.

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini merupakan upaya Dinas Kesehatan dan dukungan serta partisipasi seluruh komponen lintas sektor terkait termasuk peran swasta maupun masyarakat yang bersama-sama dan bersinergi mewujudkan sasaran strategis yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 masih menjadi permasalahan mendasar yang berpotensi menurunkan capaian kinerja. Dan untuk mengatasinya Dinas Kesehatan telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut guna meningkatkan kerjanya di tahun-tahun mendatang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	2
1.3 Aspek Strategis	5
1.4 Permasalahan Utama	9
1.5 Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Rencana Kinerja	17
2.3 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang dilaksanakan apakah tujuan dan sasaran program mencapai hasil yang diharapkan, berhasil guna dan berdaya guna yang optimal, perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap OPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati.

LKjIP merupakan laporan yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik yang wajib dilaporkan secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

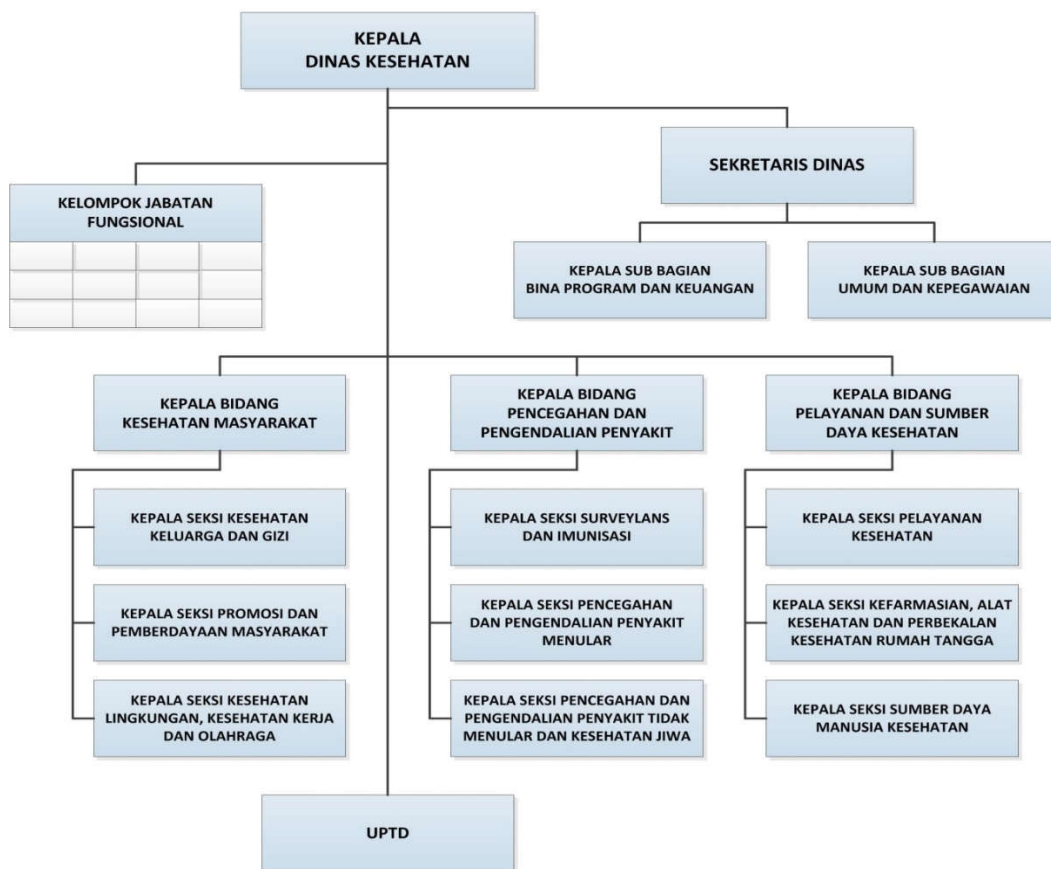
Untuk diketahui bahwa LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya menyusun LKjIP Tahun 2018 selain sebagai bentuk pertanggungjawaban juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja dan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja serta bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja pada tahun berikutnya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Hari Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Hari, disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Hari merupakan perangkat daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dalam Peraturan Bupati Pematang Hari Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Hari, disebutkan bahwa susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pematang Hari terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Bina Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang



Untuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang terdiri dari :

1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, disebutkan bahwa jumlah UPTD Puskesmas sebanyak 25 Puskesmas yang terdiri dari :

- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Banyumudal;
- b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Warungpring;
- c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pulosari;
- d. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Belik;
- e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Watukumpul;
- f. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cikadu;
- g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kebandaran;

- h. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroyom;
 - i. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Bantarbolang;
 - j. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Randudongkal;
 - k. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kalimas;
 - l. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Paduraksa;
 - m. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mulyoharjo;
 - n. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kebondalem;
 - o. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Banjardawa;
 - p. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabunan;
 - q. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jebed;
 - r. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Petarukan;
 - s. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Karangasem;
 - t. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Klareyan;
 - u. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Losari;
 - v. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Purwoharjo;
 - w. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sarwodadi;
 - x. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rowosari;
 - y. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mojo;
2. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda);
 3. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Ashari;

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk tugas pokok pada Pasal 4 disebutkan Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan termasuk juga Tugas Pembantuan. Urusan pemerintahan bidang kesehatan yang dimaksud terdiri dari :

1. Sub Urusan Upaya Kesehatan;
2. Sub Urusan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;
3. Sub Urusan Sediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
4. Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, pada Pasal 5 disebutkan Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas masing-masing struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang lebih rinci diuraikan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

1.3 ASPEK STRATEGI

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang memiliki tiga aspek strategi yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

1. Sumber Daya Manusia

- a. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2018

Komposisi pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2018 menurut jabatannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai menurut Jabatan per 31 Desember 2018

No	Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1
2	Jabatan Administrasi	- Jabatan Administrator	8
		- Jabatan Pengawas	20
		- Jabatan Pelaksana	477
3	Jabatan Fungsional	- Jabatan Fungsional	880
Jumlah			1.386

- b. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2018
 Komposisi pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2018 menurut golongan sebagaimana tertuang dalam table dibawah ini :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai menurut Golongan per 31 Desember 2018

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	Golongan IV	79
2	Golongan III	854
3	Golongan II	439
4	Golongan I	14
Jumlah		1.386

- c. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut jenis ketenagaan Per 31 Desember 2018
 Jumlah tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2018 menurut jenis tenaga kesehatan berstatus ASN.

Tabel 1.3
Jumlah Tenaga Kesehatan per 31 Desember 2018

No	Tenaga Kesehatan	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Tenaga Medis	Dokter Spesialis	20
		Dokter Umum	75
		Dokter Gigi	19
2	Tenaga Keperawatan	Perawat	342
		Perawat Gigi	12
3	Tenaga Kebidanan	Bidan	371
4	Tenaga Kefarmasian	Teknis Kefarmasian	25
		Apoteker	11
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	36
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Sanitarian	30

No	Tenaga Kesehatan	Jenis Tenaga	Jumlah
7	Tenaga Gizi	Nutrisionis	35
8	Tenaga Keterampilan Fisik	Fisioterapis	2
		Okupasi Terapis	1
		Terapis Wicara	1
9	Tenaga Keteknisian Medis	Radiografer	10
		Eletromedis	3
		Teknisi Gigi	1
		Analisis Kesehatan	34
		Rekam Medis	17
Jumlah			1.045

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kesehatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam pembangunan bidang kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pemalang sampai dengan akhir Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan per 31 Desember 2018

No	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	1 Unit
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1 Unit
3	Rumah Sakit Swasta	7 Unit
4	Puskesmas Rawat Inap	7 Unit
5	Puskesmas Non Rawat Inap	18 Unit
6	Puskesmas Pembantu	62 Unit
7	Puskesmas Keliling Roda 4	47 Unit
8	Poskesdes/ PKD	141 Unit

No	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah
9	Laboratorium Kesehatan Daerah	1 Unit
10	Gudang Obat/ Instalasi Farmasi	1 Unit
11	Klinik Pengobatan	21 Unit
12	Praktek Dokter Perorangan	163 Unit
13	Unit Tranfusi dan Bank Darah	2 Unit
14	Apotek	107 Unit
15	Toko Obat	16 Unit
16	Penyalur Alat Kesehatan	1 Unit

3. Sumber Dana

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan anggaran yang memadai. Berikut ini sumber dana kesehatan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5
Sumber Dana Kesehatan pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	182.678.908.080,-
2	Dana Alokasi Khusus (DAK)	29.052.953.720,-
3	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	3.600.000.000,-
4	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	59.900.000.000,-
5	Dana Penerimaan Retribusi Jasa Umum	13.000.000.000,-
6	Dana Penerimaan BLUD RSUD	105.769.787.000,-
Jumlah		Rp. 394.001.648.800,-

Berikut ini table rincian anggaran kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 yang terbagi dalam Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung.

Tabel 1.6
Anggaran Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	82.422.026.000,-
	- Belanja Pegawai (Gaji & TPP)	82.422.026.000,-
2	Belanja Langsung	311.579.622.800,-
	- Belanja Pegawai	111.076.680.687,-
	- Belanja Barang dan Jasa	139.441.955.533,-
	- Belanja Modal	61.060.986.580,-
Jumlah		Rp. 394.001.648.800,-

1.4 PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*)

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pemalang masih masuk dalam 10 besar kasus kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah, walaupun tren dua tahun terakhir telah menunjukkan penurunan yang signifikan.
2. Masih ditemukannya kasus Incident Rate penyakit menular yang dilaporkan setiap tahun terutama pada penyakit DBD, TB Paru, Diare, HIV/AIDS dan Kusta.
3. Semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular khususnya pada penyakit Kanker, Diabetes Mellitus, Hipertensi, Stroke, Decompensasi cordis (Kegagalan Jantung) dan Psikosis (Gangguan Jiwa) yang meningkat setiap tahunnya.
4. Belum optimalnya pelayanan tumbuh kembang anak dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), pelayanan kesehatan remaja dan pelayanan kesehatan bagi Lansia.
5. Belum optimalnya upaya promosi kesehatan dan kurangnya informasi kesehatan mempengaruhi masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.

6. Masih rendahnya masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih sehat dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM).
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan, hal ini tercermin dari masih banyaknya rumah, jamban dan tempat-tempat umum yang belum memenuhi syarat kesehatan.
8. Belum semua masyarakat berpenghasilan menengah keatas untuk mengikuti program jaminan kesehatan nasional secara mandiri untuk melindungi kesehatan diri dan keluarganya.
9. Belum idealnya rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk sehingga akses masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan puskesmas terbatas.
10. Belum semua mutu pelayanan kesehatan di puskesmas terstandarisasi, hal ini terlihat dari belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar.
11. Belum idealnya rasio rumah sakit dan rasio tempat tidur rumah sakit di Kabupaten Pemalang terhadap jumlah penduduk yang ada, sehingga akses pelayanan kesehatan rujukan oleh masyarakat belum optimal.
12. Belum optimalnya pengelolaan data satu pintu, proses perencanaan terpadu, koordinasi pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi kegiatan.
13. Belum optimalnya tata kelola unit pelayanan kesehatan baik mutu dan kinerja, yang ditandai dengan belum semua puskesmas terakreditasi sesuai standar nasional.
14. Belum optimalnya persepsi stakeholder dan lintas sektor lain, terkait paradigma sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan secara umum latar belakang, tupoksi struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dengan aspek strategis dan permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi serta sistematika penulisan laporan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini disajikan uraian singkat Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan analisis capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

Bab IV Penutup

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dan strategi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Lampiran

Pada lampiran ini disajikan pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang periode tahun 2016-2021 yang menjadi kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Lebih lanjut Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut :

1. PERNYATAAN VISI

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Berdasarkan RPJMD tersebut Visi Kabupaten Pemalang untuk lima tahun kedepan adalah : **“Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera”**.

2. PERNYATAAN MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi-misi yang mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran di Kabupaten Pemalang, yang bertanggungjawab secara teknis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang. Misi pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya

local untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi dan misi pembangunan Kabupaten Pematang Jaya, terutama Misi ke Kedua yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.

Makna Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berpihak pada publik, antara lain :

1. Pembangunan Rumah Sakit Pratama (Tipe D) di Kecamatan Comal dan Kecamatan Randudongkal.
2. Pembangunan Puskesmas yang memiliki standar pelayanan kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berbasis tenaga medis yang kompeten.
4. Mengembangkan akses pelayanan puskesmas agar masyarakat mendapat pelayanan lebih mudah.
5. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan melakukan pencegahan terhadap penyakit.
6. Memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
7. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan memberdayakan posyandu yang terintegrasi dengan pelayanan sosial.

Sedangkan keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam pencapaian Misi RPJMD yang terkait dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi
RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN					AKHIR 2021
						2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,77	72,86	72,96	73,06	73,15	73,25	73,35
			Angka Kematian Ibu (AKI)	Per - 100.000 KH	120	120	116	112	108	104	100
			Angka Kematian Bayi (AKB)	Per - 1.000 KH	8,17	10	9,5	9	8,5	8	7,5
			Angka Kematian Balita (AKABA)	Per - 1.000 KH	8,74	11	10,5	10	9,5	9	8,5
			Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,031	0,030	0,029	0,028	0,027	0,026	0,025

Tabel 2.2
Keterkaitan antara Sasaran, Strategi dan Kebijakan
RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

MISI	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat baik promotif dan preventif
		Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, penanganan kesehatan ibu dan anak dan penanganan manajemen kesehatan.	
		Menurunkan kematian ibu, bayi dan balita melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan peran serta masyarakat dan keluarga dalam deteksi resiko tinggi.	
		Menurunkan gizi buruk melalui pemberian makanan tambahan, peningkatan pendapatan, pemanfaatan pekarangan, dan keanekaragaman pangan.	Perbaikan gizi masyarakat diprioritaskan pada kelangsungan hidup bayi usia 1000 hari, penanganan gizi buruk, gizi kurang, balita stunting dan gizi lebih.

2.2 RENCANA KINERJA

Rencana kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang di tahun ketiga sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Rencana kinerja Dinas Kesehatan ini menjadi tolok ukur kinerja dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta menjadi bahan dalam pelaporan kinerja, untuk itu perlu dipedomani oleh seluruh aparatur di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

Rencana kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2018
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA
Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,06
Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	112
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak dan balita	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	9
	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	10
Meningkatnya gizi keluarga dan masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.028

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dengan Bupati Pemalang untuk mewujudkan target kinerja tahun ketiga dari Renstra OPD Tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai OPD selama Tahun 2018. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73.06
2.	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	112
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak dan balita	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	9
		Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	10
4.	Meningkatnya gizi keluarga dan masyarakat	Persentase balita gizi buruk	%	0,028

Adapun Program beserta besaran anggaran yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Anggaran Program Kesehatan Tahun 2018
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.836.472.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	949.400.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	295.000.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	144.215.000
5	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	215.000.000
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	9.023.334.680
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	26.918.660.000
8	Program Pengawasan Obat dan Makanan	133.400.000
9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.425.640.000
10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	680.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.580.000.000
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.462.805.000
13	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2.341.000.000
14	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	8.763.676.000
15	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	30.647.433.000
16	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	6.188.265.020
17	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	30.000.000
18	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	117.447.100
19	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	4.489.303.000
20	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD	105.769.787.000
21	Program peningkatan pelayanan kesehatan perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional	103.110.785.000
22	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja	253.000.000
23	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	765.000.000
24	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	440.000.000
JUMLAH		311.579.622.800

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan atau outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak. Oleh karena itu, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

1. Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja di Dinas Kesehatan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target dengan menggunakan rumus :

- 1) Apabila realisasi semakin tinggi menunjukkan capaian kinerja semakin baik dan apabila realisasi semakin rendah menunjukkan capaian kinerja semakin kurang, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Apabila realisasi semakin tinggi menunjukkan capaian kinerja semakin rendah atau realisasi semakin rendah menunjukkan capaian kinerja semakin tinggi, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	≥ 85%	Sangat Baik
II	≥ 70% - < 85%	Baik
III	≥ 55% - < 70%	Cukup
IV	< 55%	Kurang

2. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018. Pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018 secara lengkap ditunjukkan pada Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun			Tahun 2018				Target Akhir 2021
		2015	2016	2017	Target	Realisasi	%Capaian Kinerja	Kategori	
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	72.77	72.87	72.98	73.06	N/A	N/A	N/A	73.35
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	120	182	100	112	66.94	140.23%	Sangat Baik	100
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	8.17	7.43	5.57	9	5.83	135.22%	Sangat Baik	7.5
4	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH	8.74	8.51	6.22	10	6.30	137%	Sangat Baik	8.5
5	Persentase Balita Gizi Buruk	0.031	0.048	0.014	0.028	0.021	125%	Sangat Baik	0.026

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Indikator kinerja sasaran dalam rangka meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018 tercatat sebanyak 4 (empat) indikator kinerja dari 5 (lima) indikator kinerja yang semua capaian kerjanya masuk dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Usia Harapan Hidup belum dapat dievaluasi sebab menunggu data keluaran dari BPS.

1) Usia Harapah Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun hidup yang akan dijalani/ ditempuh oleh seseorang sejak lahir sampai pada waktu tertentu saat ia meninggal. Untuk diketahui bahwa Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu ; umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Data Usia Harapan Hidup di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada urusan kesehatan dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataanya UHH bukan hanya ditentukan oleh urusan kesehatan semata, melainkan urusan lainnya yang menyangkut hidup dasar manusia. Urusan ekonomi khususnya pendapatan keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan UHH.

Dengan mengedepankan upaya peningkatan pendapatan keluarga, diharapkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti pemenuhan makanan bergizi seimbang dan mengakses pelayanan kesehatan dengan pembiayaan secara mandiri serta memiliki rumah dengan lingkungan yang memenuhi syarat sehat.

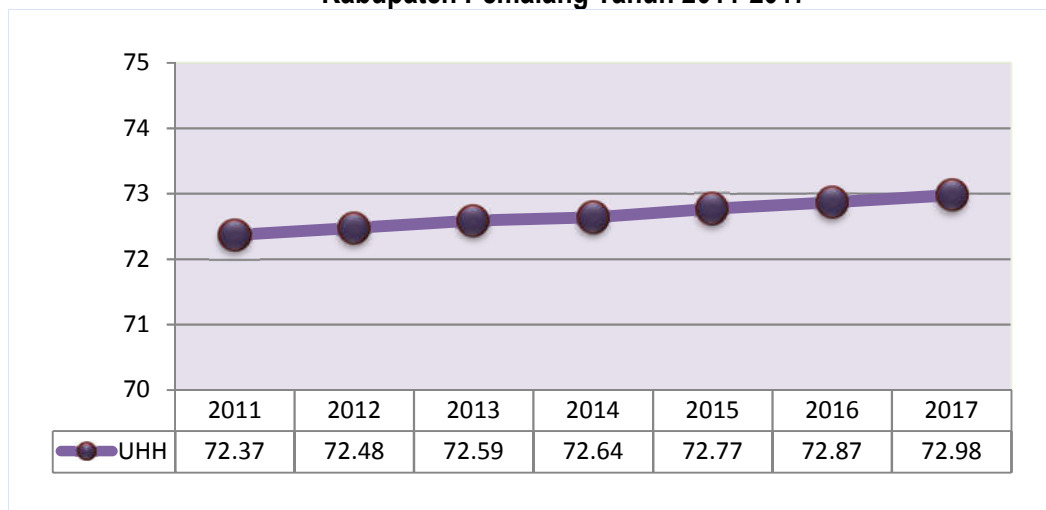
Merujuk data BPS terkait data UHH Kabupaten Pemalang Tahun 2018 belum dapat dipublikasikan sebab masih dalam proses pengolahan data. Namun data terakhir UHH Kabupaten Pemalang Tahun 2017 yang dikeluarkan BPS adalah sebesar 72,98. Angka ini meningkat dibandingkan UHH Tahun 2016 sebesar 72,87 dan juga melampaui Target UHH Tahun 2017 sebesar 92.96.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Usia Harapan Hidup (UHH)
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			% Capaian 2017	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021
		Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	73.06	N/A	N/A	100.03%	N/A

Dari Tabel diatas terlihat, persentase capaian UHH Tahun 2018 belum dapat ditampilkan sebab data realisasi UHH menunggu data publikasi dari BPS, tetapi untuk persentase capaian UHH Kabupaten Pemalang Tahun 2017 tercatat sebesar 100,03% yang artinya UHH Tahun 2017 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Walaupun data UHH Kabupaten Pemalang Tahun 2018 belum keluar namun secara garis besar usia harapan hidup Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya seperti terlihat gambar grafik dibawah ini.

Gambar 3.1
Usia Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2017



2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu Maternal (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang

kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri.

Kejadian meninggalnya ibu maternal biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang mana dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu penyebab kematian ibu maternal juga tidak lepas dari kondisi ibu itu sendiri, yaitu terlalu tua (>35 tahun) dan terlalu muda (<20 tahun) pada saat melahirkan, terlalu banyak anak (>4 anak) dan terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2 tahun). Permasalahan tersebut diatas diakibatkan kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang perawatan kehamilan dan faktor risiko yang terjadi saat kondisi ibu hamil, bersalin dan nifas.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam rangka menurunkan AKI adalah upaya peningkatan pengetahuan ibu hamil dan keluarga melalui kegiatan kelas ibu hamil, memfasilitasi rumah tunggu kelahiran, melakukan kegiatan kunjungan rumah ibu hamil, kegiatan pemantauan dan pendampingan ibu hamil risti oleh masyarakat dan kader, pembinaan kader dan dukun bayi, peningkatan kompetensi bidan dalam penanganan ibu hamil dan pelayanan rujukan ibu hamil risiko tinggi serta kerjasama lintas sektoral dan pembinaan desa siaga.

Angka Kematian Ibu Maternal di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebesar 66.94 per 100.000 kelahiran hidup, angka ini jauh menurun dibanding dengan Tahun 2017 yaitu sebesar 100 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dari target RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebesar 112 per 100.000 kelahiran hidup maka AKI Kabupaten Pemalang telah melampaui dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel dibawah ini terlihat, persentase capaian AKI Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebesar 140,23% yang artinya angka tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan dan besarnya meningkat dibanding dengan persentase capaian AKI Tahun 2017 sebesar 113,79%.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI)
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			% Capaian 2017	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021
		Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	112	66.94	140.23%	113.79%	133.06%

Pada gambar grafik dibawah ini terlihat, AKI Kabupaten Pemalang di dua tahun terakhir menunjukkan penurunan yang signifikan, hal ini menunjukkan kasus kematian ibu di Kabupaten Pemalang terus berkurang.

Gambar 3.2
Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2018



3) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Beberapa penyebab terbanyak kematian bayi di Kabupaten Pemalang adalah Asfiksia, Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan penyakit Infeksi

yang diderita oleh bayi. Permasalahan ini diakibatkan kurangnya informasi orangtua mengenai perawatan bayi, tumbuh kembang balita dan upaya pencegahan penyakit serta kondisi sanitasi tempat tinggal yang tidak sehat.

Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan AKB adalah melalui peningkatan pengetahuan orangtua melalui kelas ibu balita, revitalisasi posyandu, pembinaan kader, sosialisasi dan kerjasama lintas sektoral, peningkatan kompetensi nakes dalam manajemen terpadu balita sakit, peningkatan pelayanan kesehatan neonatal dan bayi, pemberian imunisasi lengkap, penanganan bayi dengan BBLR sesuai standar.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pemalang tahun 2018 sebesar 5,83 per 1.000 kelahiran hidup, angka ini sedikit meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 5,57 per 1.000 kelahiran hidup. Bila ditilik dari target RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebesar 9 per 1.000 kelahiran hidup maka telah melampaui target yang ditetapkan.

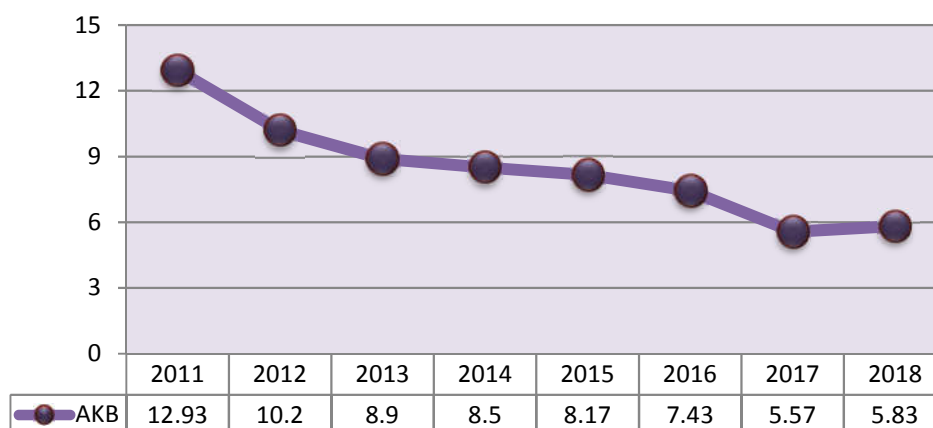
Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi (AKB)
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			% Capaian 2017	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021
		Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak dan balita	Angka Kematian Bayi (AKB)	9	5.83	135.22%	141.37%	122.27%

Pada tabel diatas ini terlihat, persentase capaian AKB Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebesar 135,22% yang artinya angka tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan dan besarnya sedikit menurun dibanding dengan persentase capaian AKI Tahun 2017 sebesar 141,37%.

Sedangkan pada gambar grafik dibawah ini terlihat, secara garis besar tren AKB di Kabupaten Pemalang menunjukkan penurunan dari tahun ke tahunnya, hal ini menunjukkan kasus kematian bayi di Kabupaten Pemalang juga terus berkurang.

Gambar 3.3
Angka Kematian Bayi (AKB)
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2018



4) Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian balita (0-5 tahun) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/ Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/ Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan.

Penyebab AKABA di Kabupaten Pemalang tidak jauh berbeda dengan penyebab AKB. Untuk diketahui bahwa kasus kematian balita, dihitung berdasarkan kasus kematian balita usia 0-5 tahun, dimana kasus kematian bayi usia 0-1 tahun merupakan penyumbang terbanyak kasus kematian balita.

Dan upaya penurunan AKABA pun tidak dapat dipisahkan dari upaya penurunan AKB. Upaya-upaya yang telah dilakukan merupakan lanjutan penurunan AKB ditambah beberapa upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKABA seperti pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu melibatkan kader kesehatan, pemberian vitamin dan makanan tambahan pendamping ASI, serta pengaplikasian manajemen terpadu balita sakit (MTBS) di seluruh puskesmas, peningkatan sanitasi rumah dan lingkungan serta kerjasama dalam Program Pamsimas dalam kemudahan akses air bersih.

Angka Kematian Balita di tahun 2018 sebesar 6,30 per 1.000 kelahiran hidup, sedikit meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 6,22 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dari target RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2018

sebesar 10 per 1.000 kelahiran hidup maka AKABA Kabupaten Pemalang sudah melampaui target yang ditetapkan.

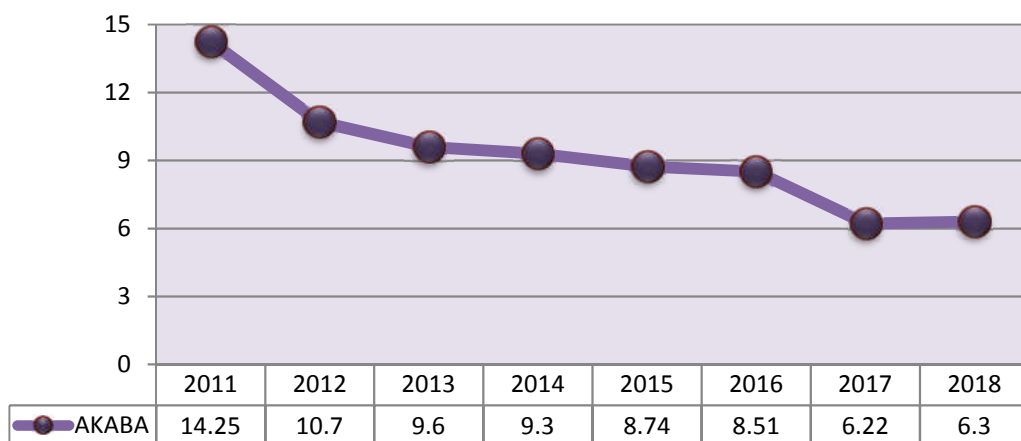
Pada tabel dibawah ini terlihat, persentase capaian AKABA Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebesar 137,00% yang artinya angka tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan dan besarnya sedikit menurun dibanding dengan persentase capaian AKI Tahun 2017 sebesar 140,76%.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Balita (AKABA)
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			% Capaian 2017	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021
		Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak dan balita	Angka Kematian Bayi (AKB)	10	6.30	137.00%	140.76%	125.88%

Pada gambar grafik dibawah ini terlihat, AKABA Kabupaten Pemalang di menunjukkan tren penurunan yang signifikan, hal ini menunjukkan kasus kematian balita di Kabupaten Pemalang terus berkurang.

Gambar 3.4
Angka Kematian Balita (AKABA)
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2018



5) Persentase Balita Gizi Buruk

Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya penyakit infeksi, diare, cacangan dan penyakit lainnya. Umumnya kasus balita gizi buruk diderita oleh balita penderita penyakit infeksi kronis disertai kurangnya asupan makanan bergizi sehingga memperburuk status gizi balita tersebut. Permasalahan tersebut biasanya akibat rendahnya pendapatan keluarga ditambah sanitasi tempat tinggal yang tidak sehat.

Upaya penurunan kasus balita gizi buruk telah dilakukan melalui upaya peningkatan status gizi bayi dan balita seperti penyuluhan/ konseling inisiasi menyusui dini (IMD), pemberian Asi Eksklusif pada bayi <6 bulan, pemberian vitamin dan makanan pendamping/ tambahan pada balita, serta pemantauan tumbuh kembang balita. Selain itu upaya penanganan kasus balita gizi buruk dilakukan dengan kegiatan pelacakan balita kurus/ gizi buruk dan perawatan khusus bagi balita dengan gizi buruk sesuai standar termasuk pengobatan penyakit penyerta pada balita gizi buruk.

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebesar 0,021%, meningkat dibandingkan Tahun 2017 sebesar 0,014%. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebesar 0,028% maka persentase balita gizi buruk sudah mencapai target yang ditetapkan.

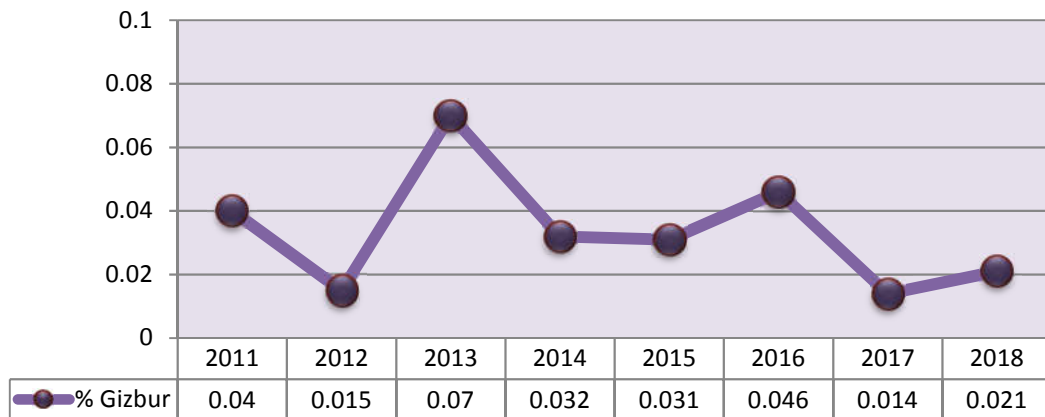
Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Balita Gizi Buruk
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			% Capaian 2017	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021
		Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya gizi keluarga dan masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	0.028	0.021	125.00%	151.72%	119.23%

Pada tabel diatas ini terlihat, persentase capaian persentase balita gizi buruk di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebesar 125,00% yang artinya angka tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun angka tersebut menurun jika dibanding dengan persentase capaian persentase balita gizi buruk Tahun 2017 sebesar 151,72%.

Sedangkan pada gambar grafik dibawah ini terlihat, secara garis besar persentase balita gizi buruk di Kabupaten Pemalang menunjukkan tren fluktuatif dari tahun ke tahunnya, hal ini menunjukkan kasus balita gizi buruk di Kabupaten Pemalang dapat berkurang dan bertambah setiap tahunnya.

Gambar 3.5
Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2018



3.2 AKUNTABILITAS ANGGARAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan tetapi berorientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip akuntabilitas, untuk menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam penyediaan dan memberikan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Namun, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting untuk memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik dapat dicapai. Berikut ini capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam rangka mencapai sasaran strategis Tahun 2018 :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018

KINERJA						ANGGARAN				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	No	Program OPD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	100	100	100	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.836.472.000	2.668.142.085	94.07
2.	Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan dan pengembangan Kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	100	100	100	2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	949.400.000	911.261.112	95.98
3.	Tersedianya aparatur PD yang memiliki kapasitas, kompetensi & profesionalitas	Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	60	100	166.67	3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	295.000.000	259.767.000	88.06
4.	Tersedianya berbagai jenis Pelaporan capaian kinerja Pelaksanaan kegiatan & keuangan PD	Persentase dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	60	100	166.67	4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	144.215.000	81.024.100	56.18
5.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian & evaluasi pelaporan yg disusun secara teknokratis, koordinatif & partisipatif serta informatif	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	60	100	166.67	5.	Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD	215.000.000	129.476.379	60.22
6.	Tersedianya data/ informasi kesehatan daerah yg lengkap, valid, terbaharui, terstandar serta terpublikasi	Persentase puskesmas yang melaporkan data kesehatan	100	100	100	6.	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	440.000.000	294.989.300	67.04

KINERJA						ANGGARAN				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	No	Program OPD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7.	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	73.06	N/A	-	7.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	9.023.334.680	8.854.182.833	98.13
						8.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	133.400.000	116.070.000	87.01
						9.	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	117.447.100	109.495.000	93.23
						10.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	26.918.660.000	23.329.721.257	86.67
						11.	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	6.188.265.020	4.598.208.076	74.31
						12.	Program Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD	105.769.787.000	87.394.388.526	82.63
						13.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional	103.110.785.000	56.505.921.419	54.80
						14.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2.341.000.000	1.259.723.100	53.81
						15.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	30.647.433.000	27.328.118.759	89.17
						16.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	8.763.676.000	7.203.760.000	82.20
17.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.462.805.000	2.345.493.597	95.24						

KINERJA						ANGGARAN				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	No	Program OPD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
						18.	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	765.000.000	703.264.585	91.93
						19.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	30.000.000	30.000.000	100
						20.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.580.000.000	1.571.452.500	99.46
						21.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.425.640.000	3.259.731.800	95.16
8.	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	112	66.94	140.23	22.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	4.489.303.000	3.279.827.900	73.06
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak dan balita	Angka Kematian Bayi (AKB)	9	5.83	135.22	23.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja	253.000.000	252.941.000	99.98
		Angka Kematian Balita (AKABA)	10	6.30	137.00					
10.	Meningkatnya gizi keluarga dan masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	0.028	0.021	125.00	24.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	680.000.000	676.602.750	99.50
RATA-RATA PERSENTASE REALISASI KINERJA TAHUN 2018					133.75	RATA-RATA PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018				74.83

Untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran strategis Tahun 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang didukung dengan dana/ anggaran belanja sebesar Rp. 394.001.648.800,- yang terbagi ke dalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 82.422.026.000,- (20,92%) dan alokasi belanja langsung sebesar Rp. 311.579.622.800,- (79,08%).

Realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp. 284.600.912.578,- terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp. 51.437.349.500,- atau 62,41% dari jumlah anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 82.422.026.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 233.163.563.078,- atau 74,83% dari jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp. 311.579.622.800,-. Persentase capaian kinerja anggaran belanja langsung Tahun 2018 sebesar 74,83% menurun bila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 79,86%.

Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan mendapatkan pendapatan yang berasal dari retribusi jasa umum dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan besaran realisasi pendapatan Tahun 2018 sebesar Rp. 159.735.998.244,- (101,10%) dari target pendapatan tahun 2018 sebesar Rp. 158.000.000.000,-. Adapun rincian pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pendapatan dan Belanja Tahun 2018
Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)	%
PENDAPATAN	158.000.000.000	159.735.998.244	1.735.998.244	101.10
PENDAPATAN ASLI DAERAH	158.000.000.000	159.735.998.244	1.735.998.244	101.10
BELANJA	394.001.648.800	284.600.912.578	(109.400.736.222)	72.23
BELANJA TIDAK LANGSUNG	82.422.026.000	51.437.349.500	(30.984.676.500)	62.41
BELANJA LANGSUNG	311.579.622.800	233.163.563.078	(78.416.059.722)	74.83

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menitikberatkan pada manajemen organisasi berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap OPD melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun sebelumnya dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas pokok melaksanakan urusan di bidang kesehatan, dengan ini melaporkan kinerja Tahun 2018 dengan target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data-data diatas, maka kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Usia Harapan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2018 belum dapat dipublikasikan, sebab data UHH merujuk data dari BPS yang saat ini masih dalam proses pengolahan data. Namun bila melihat UHH Tahun 2017 sebesar 72,98 maka hasilnya telah melebihi target Tahun 2017 sebesar 73.96 atau persentase capaiannya sebesar 100,03% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.
2. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2018 adalah sebesar 66,94 per 100.000 KH, angka ini lebih baik dibandingkan dengan capaian AKI Tahun 2017 sebesar 100 per 100.000 KH. Apabila dilihat dari persentase capaian AKI Tahun 2018 sebesar 140,23% maka capaian kinerja AKI termasuk dalam kategori Sangat Baik.
3. Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2018 tercatat sebesar 5,83 per 1.000 KH sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian AKB Tahun 2017 sebesar 5,57 per 1.000 KH. Namun bila dilihat dari persentase capaian AKB Tahun 2018 maka capaian kinerjanya masih termasuk dalam kategori Sangat Baik dengan nilai sebesar 135,22%.
4. Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2018 adalah sebesar 6,30 per 1.000 KH, angka ini sedikit meningkat dibandingkan dengan AKABA Tahun 2017 sebesar 6,22 per

1.000KH. Apabila dilihat dari persentase capaian AKABA sebesar 137% maka capaian kinerja termasuk dalam kategori Sangat Baik.

5. Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2018 tercatat sebesar 0,021% meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 0,014%. Namun bila dilihat dari persentase capaian AKB Tahun 2018 sebesar 125% maka capaian kinerjanya masih termasuk dalam kategori Sangat Baik.
6. Secara garis besar rata-rata persentase realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018 adalah sebesar 133,75%.
7. Sedangkan rata-rata persentase realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebesar 74,83% (masih dibawah 85%), yang dihitung dari penyerapan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 233.163.563.078,- dengan besaran anggaran belanja langsung sebesar Rp. 311.579.622.800,-.

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018, antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan manajemen organisasi khususnya dalam melaksanakan tupoksi dalam rangka mencapai target kinerja akibat perubahan SOTK menjadi Tipe B.
2. Belum sinkron dan padunya perencanaan dalam mencapai target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Belum optimalnya penyerapan belanja langsung anggaran kesehatan, dimana persentase realisasinya masih dibawah 85%, yang dimungkinkan dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4. Belum adanya pengelolaan data satu pintu sehingga data capaian program kesehatan belum sinkron dan tersedia dengan baik.
5. Rasio Puskesmas dengan jumlah penduduk yang belum ideal, menjadikan jangkauan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terbatas.
6. Belum meratanya kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan dan belum semua ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan memenuhi standar yang ada.
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih sehat dan hidup sehat secara mandiri.
8. Belum terbukanya persepsi stakeholder dan lintas sektor lain, terkait paradigma sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya di tahun mendatang antara lain :

1. Mengusulkan perubahan Tipe SOTK Dinas Kesehatan menjadi A, hal ini terkait dengan urusan wajib dan uraian tugas pokok fungsi yang luas.
2. Perbaiki pengelolaan perencanaan dengan melakukan cascade down sehingga program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal secara berkala (Triwulan) untuk mengukur sejauh mana proses pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan.
4. Pembenahan pengelolaan data satu pintu untuk memudahkan pemutakhiran data capaian program kesehatan.
5. Perlu adanya kajian pengembangan dan penambahan puskesmas secara bertahap sesuai standar dengan mengacu Permenkes Nomor 75 tentang Puskesmas.
6. Rekrutmen Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai kompetensinya dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kesehatan sesuai standar.
7. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat melalui gerakan hidup sehat dan meningkatkan mutu pelayanan kuratif dan rehabilitatif di sarana pelayanan masyarakat.
8. Melakukan sosialisasi dan koordinasi melibatkan stakeholder dan lintas sektoral terkait paradigma sehat dan pembangunan berwawasan sehat.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. ERNA NURAINI, M.Hlth.Sc.**
Jabatan : **Kepala Dinas Kesehatan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. JUNAEDI, SH., MM.**
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, Januari 2019

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

H. JUNAEDI, SH., MM.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kesehatan

dr. ERNA NURAINI, M.Hlth.Sc.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Jumlah
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,15
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu	Angka kematian ibu (AKI)	per 100.000 KH	108
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	84
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak dan balita	Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 KH	8.5
		Angka kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	9.5
4	Meningkatnya gizi keluarga dan masyarakat	Persentase balita gizi buruk	%	0.027
		Persentase balita pendek (stunting)	%	22.5

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.289.865.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.010.500.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	280.000.000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	220.000.000
5	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	227.000.000
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.702.803.000
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	33.432.359.000
8	Program Pengawasan Obat dan Makanan	120.000.000
9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.255.000.000
10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.588.898.000
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	3.872.000.000
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3.644.303.000
13	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.427.400.000
14	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu	16.857.348.000
15	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru	36.704.140.000
16	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	21.600.000.000
17	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	90.750.000
18	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	150.000.000
19	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.548.900.000
20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	85.350.000.000

21	Program peningkatan pelayanan kesehatan perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional	58.800.000.000
22	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja	249.151.000
23	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	3.004.751.000
24	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	440.000.000
Total Anggaran		282.865.168.000

Pemalang, Januari 2019

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

H. JUNAEDI, SH., MM.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kesehatan

dr. ERNA NURAINI, M.Hith.Sc.





**RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Jumlah
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,25
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu	Angka kematian ibu (AKI)	per 100.000 KH	104
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	85
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak dan balita	Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 KH	8
		Angka kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	9
4	Meningkatnya gizi keluarga dan masyarakat	Persentase balita gizi buruk	%	0.026
		Persentase balita pendek (stunting)	%	22

Pemalang, 21 Januari 2019
Kepala Dinas Kesehatan


dr. ERNA NURAINI, M.Hlth.Sc.

